



**PEMERINTAH  
PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG**

**RENCANA  
KERJA  
(RENJA)  
Tahun 2023**

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

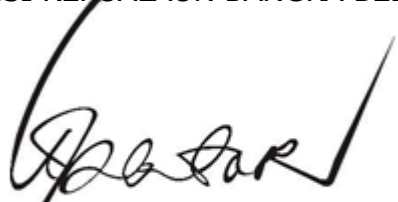
## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai..

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah. Sasaran yang akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan diukur dengan Indikator Kinerja untuk mengetahui tingkat capaian target yang ada dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2023

Demikianlah Rencana kerja ini dibuat, kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam memberikan pelayanan ke arah lebih baik lagi sesuai sasaran yang akan kita capai.

PANGKALPINANG, MARET 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPUALAUN BANGKA BELITUNG



Dr. Drs. NAZIARTO, S.H., M.H  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640321 199103 1 009

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Isi Tabel .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1   Latar Belakang .....	1
1.2   Landasan Hukum .....	3
1.3   Maksud dan Tujuan .....	5
1.4   Sistematika Penulisan .....	5
BAB II   HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU .....	7
2.1   Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 .....	8
2.2   Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	55
2.3   Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	60
2.4   Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	61
2.5   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	
BAB III   TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	100
3.1   Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	100
3.2   Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	100
3.3   Program dan Kegiatan .....	100
BAB IV   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	103
4.1   Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 .....	104
BAB V    PENUTUP .....	141



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah dan selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat 3 menyebutkan bahwa rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 disusun melalui 4 (empat) tahapan yaitu pertama persiapan penyusunan Renja; kedua penyusunan rancangan Renja; ketiga pelaksanaan forum PD; dan keempat penetapan Renja. Tahap persiapan dimulai dengan menyusun rancangan keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang pembentukan tim penyusun Renja Sekretariat Daerah, orientasi mengenai Renja Sekretariat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Sekretariat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Tahap kedua yaitu penyusunan rancangan Renja disusun mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023, mengacu pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023- 2026 serta Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026, dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun-tahun

sebelumnya. Renja Sekretariat Daerah juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Tahapan ketiga yaitu membahas rancangan Renja Sekretariat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembahasan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan usulan program dan kegiatan biro-biro; menajamkan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah; menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing biro; menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang penyampaian rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Peserta Forum Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat daerah kabupaten/kota dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Hasil kesepakatan pembahasan forum PD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang menghadiri forum PD untuk selanjutnya hasil kesepakatan ini dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja PD yang merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyempurnaan rancangan Renja dilakukan setelah RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan. Setelah disempurnakan kemudian diverifikasi untuk memastikan rancangan Renja telah sesuai dengan RKPD, untuk selanjutnya Renja Sekretariat Daerah tahun 2023 ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D). Sebagai lembaga perencanaan, Sekretariat Daerah diharapkan mampu membantu menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerahnya, dimana mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor ... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan untuk menjamin tercapainya sasaran diperlukan sinergi dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan, adapun tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Mewujudkan pelayanan tugas dan wewenang perangkat daerah yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat tepat sasaran dan berkesinambungan;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mulai dari awal perencanaan;
3. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja dan Pengendali kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar terarah dan sesuai dengan visi, misi, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan;

### **1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja PD**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

#### **BAB I                    PENDAHULUAN**

1.1    Latar Belakang

1.2    Landasan Hukum

1.3    Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

**BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

4.1. Program, Kegiatan Sub Kegiatan

**BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2021, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun 2022 (tahun berjalan)**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun....		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Pernagk at Daerah tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/8)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	78	%		76	77,5	77,5	78	77,75	100%
		Survey Kepuasan Pelayanan Internal SETDA	80	%		80	88,37	88,37	80	84,185	105%

4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi PD Setda yang disusun tepat waktu	90	%		90	91	91	90	90,5	101%
4.01.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (DOKREN)	8	Dokumen		4	4	4	8	6	75%
4.01.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD	10	Dokumen		5	5	5	10	7,5	75%
4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan SETDA	80	%		80	90	90	80	85	106%
4.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelayanan Urusan Gaji dan Tunjangan Internal SETDA yang dilaksanakan	44	Laporan		20	20	20	44	32	73%
4.01.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan	80	%		80	87,7	87,7	80	83,85	105%

		Perlengkap an SETDA									
4.01.01. 1.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelayanan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	26	Laporan		14	14	14	26	20	77%
4.01.01. 1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal SETDA	80	%		80	90,46	90,46	80	85,23	107%
4.01.01. 1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pelayanan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang dilaksanakan	18	Laporan		6	6	6	18	12	67%
4.01.01. 1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelayanan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan									

4.01.01. 1.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelayanan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	18	Laporan		6	6	6	18	12	67%
4.01.01. 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Rumah Tangga SETDA	80	%		80	87,7	87,7	80	83,85	105%
		Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan SETDA	80	%		80	90	90	80	85	106%
4.01.01. 1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pelayanan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.01. 1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelayanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan	15	Laporan		3	3	3	15	9	60%

4.01.01. 1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pelayanan Peralatan Rumah Tangga yang dilaksanakan	15	Laporan		3	3	3	15	9	60%
4.01.01. 1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelayanan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.01. 1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pelayanan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.01. 1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pelayanan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.01. 1.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pelayanan Penyediaan Bahan/Mate rial yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.01. 1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelayanan Kunjungan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%



		Tamu yang dilaksanakan									
4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelayanan Perjalanan Dinas Internal SETDA yang dilaksanakan	25	Laporan		13	13	13	25	19	76%
		Jumlah Pelayanan Perjalanan Dinas Internal Biro Umum yang dilaksanakan	25	Laporan		13	13	13	25	19	76%
4.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Perlengkapan SETDA	80	%		80	87,7	87,7	80	83,85	105%
4.01.01.1.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelayanan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan									

4.01.01. 1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pelayanan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan	19	Laporan		7	7	7	19	13	68%
4.01.01. 1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pelayanan Pengadaan Alat Besar yang dilaksanakan									
4.01.01. 1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pelayanan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dilaksanakan									
4.01.01. 1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pelayanan Pengadaan Mebel yang dilaksanakan									
4.01.01. 1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelayanan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	18	Laporan		6	6	6	18	12	67%

4.01.01. 1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pelayanan Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan									
4.01.01. 1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pelayanan Pengadaan Aset Tak Berwujud yang dilaksanakan									
4.01.01. 1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelayanan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan									
4.01.01. 1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelayanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan									
4.01.01. 1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelayanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung									

		Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan									
4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal SETDA	80	%		80	87,7	87,7	80	83,85	105%
4.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dilaksanakan	32	Laporan		20	20	20	32	26	81%
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelayanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%

4.01.01. 1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.01. 1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Perlengkapan SETDA	80	%		80	87,7	87,7	80	83,85	105%
4.01.01. 1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelayanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.01. 1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pelayanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%

		Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan									
4.01.01. 1.09.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Pelayanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar yang dilaksanakan									
4.01.01. 1.09.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pelayanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dilaksanakan									
4.01.01. 1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Mebel	17	Laporan		5	0	0	17	8,5	50%

		yang dilaksanakan									
4.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	18	Laporan		6	6	6	18	12	67%
4.01.01.1.09.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan									
4.01.01.1.09.08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud yang dilaksanakan									
4.01.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan	18	Laporan		6	6	6	18	12	67%

4.01.01. 1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan	18	Laporan		6	6	6	18	12	67%
4.01.01. 1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan									
4.01.01. 1.09.12	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah yang dilaksanakan									
4.01.01. 1.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan SETDA	80	%		80	85,68	85,68	80	82,84	104%



4.01.01. 1.11.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.01. 1.11.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.01. 1.11.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.01. 1.11.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%

		Daerah yang dilaksanakan									
4.01.01.1.12	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan SETDA	80	%		80	85,68	85,68	80	82,84	104%
4.01.01.1.12.01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Capaian Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.01.1.12.02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Capaian Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%

4.01.01. 1.12.03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Capaian Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.01. 1.13	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Survey Kepuasan Pelayanan Protokol SETDA	80	%		80	85,68	85,68	80	82,84	104%
4.01.01. 1.13.01	Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Koordinasi Pelayanan Materi Pimpinan yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.01. 1.13.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Koordinasi Pelayanan Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan								0	
4.01.01. 1.13.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Koordinasi Pelayanan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan yang dilaksanakan								0	

4.01.01.1.14	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Survey Kepuasan Pelayanan Protokol SETDA	80	%		80	85,68	85,68	80	82,84	104%
4.01.01.1.14.01	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Koordinasi Pelayanan Pelaksanaan Acara yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.01.1.14.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Pelayanan Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan									
4.01.01.1.14.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Koordinasi Pelayanan Hubungan Keprotokolan yang dilaksanakan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi Daerah yang tersusun	80	%		80	80	80	80	80	100%

4.01.02.1.01	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Usulan Rekomendasi Kelembagaan	80	%		80	80	80	80	80	100%
		Persentase Usulan Rekomendasi Analisis Jabatan	80	%		80	80	80	80	80	100%
4.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah pendampingan dan pembinaan evaluasi organisasi yang dilaksanakan	8	Laporan		4	4	4	8	6	75%
		Jumlah UPT/Cabdin/ Satuan Pendidikan yang terevaluasi	14	UPT/Cabdin		7	7	7	14	10,5	75%
		Jumlah Raperda Kabupaten/ Kota yang terevaluasi	8	Raperda		4	4	4	8	6	75%
		Jumlah Laporan/rekomendasi hasil evaluasi organisasi	8	Laporan		4	4	4	8	6	75%

4.01.02. 1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan pengendalia n PD Kab/Kota	8	Laporan		4	3	3	8	5,5	69%
		Jumlah Evaluasi kelembagaa n Perangkat Daerah Kab/Kota	14	Laporan		7	7	7	14	10,5	75%
		Jumlah Rekomendas i pembentuka n PD Kab/Kota	14	Laporan		7	7	7	14	10,5	75%
4.01.02. 1.01.03	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Pembinaan dan pendamping an penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan peta jabatan sesuai dengan ketentuan	8	Kali		4	1	1	8	4,5	56%

		Jumlah Pembinaan dan pendampingan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sesuai dengan ketentuan	8	Kali		4	4	4	8	6	75%
		Jumlah Pembinaan dan pendampingan penyusunan Evaluasi Jabatan sesuai dengan ketentuan	8	Kali		4	4	4	8	6	75%
		Jumlah PD yang menyusun Kebutuhan pegawai sesuai dengan ketentuan	8	PD		4	4	4	8	6	75%
		Jumlah jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi	8	Laporan		4	1	1	8	9	113%

		yang sudah ditetapkan									
4.01.02.1.02	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Usulan Rekomendasi Reformasi Birokrasi	80	%		80	80	80	80	80	100%
		Persentase usulan rekomendasi akuntabilitas Kinerja	80	%		80	80	80	80	80	100%
		Persentase Usulan Rekomendasi Tata Laksana Pemerintahan	80	%		80	80	80	80	80	100%
		Persentase usulan rekomendasi Peningkatan Pelayanan Publik	80	%		80	80	80	80	80	100%
4.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pertemuan Tim RBI yang dilaksanakan	4	Kali		2	2	2	4	3	75%
		Jumlah PD yang melaksanakan rencana aksi RB	54	PD		27	27	27	54	40,5	75%



		Jumlah monitoring rencana Aksi RB yang dilaksanakan	4	Kali		2	1	1	4	2,5	63%
		Jumlah Pembinaan Pelaksanaan RB yang dilaksanakan	36	Kali		18	18	18	36	27	75%
		Jumlah PD yang Melaporkan pelaksanaan RB	54	PD		27	27	27	54	40,5	75%
		Jumlah rencana aksi RB Unit Setda yang dilaksanakan	16	Laporan		8	8	8	16	12	75%
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	2	Laporan		1	1	1	2	1,5	75%
		Jumlah dokumen SAKIP yang di aplod tepat waktu	54	Dokumen		27	27	27	54	40,5	75%
		Jumlah pembinaan akuntabilitas yang dilaksanakan	16	Kali		8	8	8	16	12	75%
		Jumlah PD yang mendapatka	12	PD		6	6	6	12	9	75%

		n reward and punishment									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja Triwulan	8	Laporan		4	4	4	8	6	75%
4.01.02. 1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah agen perubahan yang melaksana n rencana aksi agen perubahan	54	Agen Perubah an		27	25	25	54	39,5	73%
		Jumlah Pembinaan Agen Perubahan yang dilaksanakan	68	Kali		34	34	34	68	51	75%
		Jumlah monitoring rencana Aksi Agen Perubahan yang dilaksanakan	8	Kali		4	7	7	8	7,5	94%
		Jumlah Agen Perubahan yang Melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi	54	Laporan		27	0	0	54	27	50%

4.01.02. 1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah PD yang telah menyederha nakan Proses Bisnis dan SOP	70	PD		35	10,1	10,1	70	40,05	57%
		Jumlah pembinaan Tatalaksana Pemerintah n yang dilaksanakan	86	Kali		43	23,1	23,1	86	54,55	63%
		Jumlah Monitoring Tatalaksana Pemerintah n yang dilaksanakan	86	Kali		43	23,1	23,1	86	54,55	63%
4.01.02. 1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Unit layanan yang melaksana n pelayanan publik dengan baik dan berkualitas	14	PD		7	7	7	14	10,5	75%
		Jumlah pembinaan dan pendamping an pelaksanaan pelayanan pubik yang dilaksanakan	152	Kali		76	76	76	152	114	75%

		Jumlah Monitoring Tatalaksana Pelayanan Publik yang dilaksanakan	24	Kali		12	12	12	24	18	75%
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun	90	%		90	90	90	90	90	100%
4.01.03.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Rekomendasi Bagian Administrasi Kewilayahan yang dibuat	90	%		90	90	90	90	90	100%
4.01.03.1.01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah tanah pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung yang telah bersertifikat	53	Bidang		41	25	25	53	39	74%
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pelaksanaan Tugas Pemerintaha	2	Dokumen		1	0	0	2	1	50%

		n yang dibuat									
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah dokumen batas wilayah yang terealisasi	14	Dokumen		7	7	7	14	10,5	75%
4.01.03.1.02	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dilaksanakan	90	%		90	90	90	90	90	100%
4.01.03.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Administrasi Kepala Daerah dan Anggota DPRD yang difasilitasi	4	Dokumen		2	2	2	4	3	75%
		Jumlah Rakorgub yang dilaksanakan	4	Dokumen		2	2	2	4	3	75%
		Jumlah admimistrasi izin luar negeri yang diusulkan	2	Dokumen		1	1	1	2	1,5	75%

4.01.03. 1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah dokumen penataan urusan yang terealisasi	7	Dokumen		5	5	5	7	6	86%
		Jumlah urusan yang menerapkan SPM	12	Dokumen		6	6	6	12	9	75%
		Terlaksananya rangkaian acara peringatan HUT Provinsi Kep. Bangka Belitung	2	Dokumen		1	1	1	2	1,5	75%
4.01.03. 1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur	2	Dokumen		1	1	1	2	1,5	75%
		Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2	Dokumen		1	1	1	2	1,5	75%
		Penyusunan Dokumen Informasi Laporan Penyelenggaraan	2	Dokumen		1	1	1	2	1,5	75%

		Pemerintah n Daerah (ILPPD)									
		Pelaksanaan Evaluasi Penyelengga raan Pemerintah n Daerah (EPPD)	14	Dokume n		7	7	7	14	10,5	75%
4.01.03. 1.03	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Rekomendas i Bagian Kerjasama yang dibuat	90	%		90	90	90	90	90	100%
4.01.03. 1.03.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Evaluasi Bantuan Hibah kepada kepada Pemerintah/ Pemerintah Lainnya dan BUMD	6	Dokume n		3	3	3	6	4,5	75%
		Jumlah proposal Bantuan Hibah kepada kepada Pemerintah/ Pemerintah Lainnya dan	4	Dokume n		2	2	2	4	3	75%

		BUMD yang terealisasi									
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Evaluasi kerjasama pemerintah daerah yang terselenggara	6	Dokumen		3	3	3	6	4,5	75%
		Jumlah proposal kerjasama pemerintah daerah yang terealisasi	4	Dokumen		2	2	2	4	3	75%
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Evaluasi kerjasama Badan Usaha/Swasta yang terselenggara	6	Dokumen		3	3	3	6	4,5	75%
		Jumlah proposal kerjasama Badan Usaha/Swasta yang terealisasi	4	Dokumen		2	2	2	4	3	75%



4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	70	%		70	72,08	72,08	70	71,04	101%
4.01.04.1.01	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Rekomendasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang dikeluarkan	75	%		75	75,36	75,36	75	75,18	100%
4.01.04.1.01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual yang dibuat	20	Berkas		6	6	6	20	13	65%
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual yang dibuat	22	Berkas		10	10	10	22	16	73%

4.01.04.1.02	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dikeluarkan	75	%		75	77,23	77,23	75	76,12	101%
4.01.04.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan yang dibuat	20	Berkas		8	8	8	20	14	70%
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan yang dibuat	20	Berkas		8	8	8	20	14	70%
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang	20	Berkas		8	8	8	20	14	70%

		Sosial yang dibuat									
4.01.04.1.03	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dikeluarkan	75	%		75	79,17	79,17	75	77,08	103%
4.01.04.1.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan yang dibuat	10	Berkas		6	6	6	10	8	80%

4.01.04. 1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dibuat	20	Berkas		0	0	0	20	10	50%
---------------------	---	---	----	--------	--	---	---	---	----	----	-----

4.01.04. 1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan yang dibuat	10	Berkas		6	6	6	10	8	80%
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang hukum yang tersusun	90	%		90	100,00	100,00	90	95	106%
4.01.05. 1.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Presentase Rekomendasi PHD yang dikeluarkan	90	%		90	64,00	64,00	90	77,00	86%
		Presentase Rekomendasi Pendokumentasian PHD	90	%		90	0,00	0,00	90	45,00	50%

		yang dikeluarkan									
		Presentase rekomendasi fasilitasi PHD Kabupaten Kota yang keluaran	90	%		90	0,00	0,00	90	45,00	50%
4.01.05.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah produk hukum pengaturan yang disusun	160	Dokumen		80	78	78	160	119	74%
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang disusun	1800	Dokumen		900	900	900	1800	1350	75%
4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah produk hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi hukumnya	600	Dokumen		300	300	300	600	450	75%
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota wilayah 1 yang difasilitasi dan dievaluasi	14	Dokumen		7	7	7	14	10,5	75%

		Jumlah produk hukum Kabupaten/ Kota wilayah 2 yang difasilitasi dan dievaluasi	14	Dokumen		7	7	7	14	10,5	75%
		Jumlah produk hukum Kabupaten/ Kota wilayah 3 yang difasilitasi dan dievaluasi	14	Dokumen		7	7	7	14	10,5	75%
4.01.05.1.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Presentase Rekomendasi Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat miskin yang dikeluarkan	90	%		90	0,00	0,00	90	45,00	50%
		Presentase rekomendasi penyelesaian sengketa hukum pemda yang dikeluarkan	90	%		90	0,00	0,00	90	45,00	50%
4.01.05.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	2	Dokumen		1	1	1	2	1,5	75%

4.01.05. 1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	umlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	90	Dokume n		45	46	46	90	68	76%
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomi an dan Pembangun an yang tersusun	65	%		65	100,00	100,00	65	82,5	127%
4.01.06. 1.01	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Rekomendas i Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomi an yang dikeluarkan	65	%		65	100,00	100,00	65	82,50	127%
4.01.06. 1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Bahan Usulan Rekomendas i Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan	12	Berkas		6	6	6	12	9	75%



		Mikro yang dibuat									
4.01.06.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro yang dibuat	8	Berkas		2	2	2	8	5	63%
4.01.06.1.02	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dikeluarkan	65	%		65	100,00	100,00	65	82,50	127%
4.01.06.1.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang dibuat	20	Berkas		8	8	8	20	14	70%

4.01.06. 1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Bahan Usulan Rekomendas i Pertambang an, Lingkungan Hidup, Energi dan Air yang dibuat	10	Berkas		4	4	4	10	7	70%
4.01.06. 1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Bahan Usulan Rekomendas i Pertambang an, Lingkungan Hidup, Energi dan Air yang dibuat	10	Berkas		4	4	4	10	7	70%
4.01.06. 1.03	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Rekomendas i Pengelolaan BUMD dan BLUD yang dikeluarkan	65	%		65	100,00	100,00	65,00	82,50	127%

4.01.06. 1.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang dibuat	10	Berkas		6	6	6	10	8	80%
4.01.06. 1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi										
4.01.06. 1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD										
4.01.06. 1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang dibuat	10	Berkas		0	0	0	10	5	50%
4.01.06. 1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD										

4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun	50	%		50	100,00	100,00	50	75	150%
4.01.07.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rekomendasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan	50	%		50	100,00	100,00	50,00	75,00	150%
4.01.07.1.01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa yang dibuat	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%

		Jasa yang dibuat									
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dibuat	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.07.1.02	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Rekomendasi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dikeluarkan	50	%		50	100,00	100,00	50	75	150%
4.01.07.1.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%

		Elektronik yang dibuat									
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dibuat	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dibuat	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.07.1.03	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rekomendasi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	50	%		50	100,00	100,00	50	75	150%

		yang dikeluarkan									
4.01.07. 1.03.01	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Bahan Usulan Rekomendas i Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.07. 1.03.02	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Bahan Usulan Rekomendas i Pembinaan kelembagaa n Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%
4.01.07. 1.03.03	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Bahan Usulan Rekomendas i Pendamping an, Konsultasi dan BinteK Pengadaan	20	Laporan		8	8	8	20	14	70%

		Barang/Jasa yang dibuat									
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangun an yang tersusun	65	%		65	100,00	100,00	65	82,50	127%
4.01.08. 1.01	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendas i Pengendalia n Administrasi Pelaksanaan Pembangun an Daerah yang dikeluarkan	65	%		65	100,00	100,00	65	82,50	127%
4.01.08. 1.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD										



4.01.08. 1.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN										
4.01.08. 1.01.03	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD dan APBN yang dibuat	18	Berkas		6	6	6	18	12	67%
4.01.08. 1.02	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan	65	%		65	100,00	100,00	65	82,50	127%
4.01.08. 1.02.01	Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang dibuat	15	Berkas		3	3	3	15	9	60%

		Jumlah Bahan Usulan Rekomendas i Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Pembangun an Daerah yang dibuat	15	Berkas		3	3	3	15	9	60%
--	--	--	----	--------	--	---	---	---	----	---	-----

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 maka Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Lainnya menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada dasarnya kegiatan Sekretariat Daerah adalah sebagai “Pembantu Gubernur dalam membuat Kebijakan”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis Pembuat Kebijakan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lebih mendorong Peningkatan Kebijakan di Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa serta Tata Kelola Organisasi untuk membawa kearah yang lebih baik lagi.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pendukung urusan pemerintahan dalam hal ini Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam membuat

kebijakan strategis menuju indeks reformasi birokrasi yang semakin baik dan meningkat , sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pelaksanaan evaluasi kinerja Tahun 2021 dilakukan terhadap capaian kinerja organisasi dengan menganalisis pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis dalam rangka mencapai sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja organisasi dapat dilihat dari analisa pada tiap-tiap sasaran strategis. Adapun capaian kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah seperti yang tertuang pada table II.2.1 sebagai berikut.

Tabel II.2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan / Analisis
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	(Jumlah Kontrak Infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal 1 tahun n / Jumlah Keseluruhan tahun n) x 100%									0%	Renstra 2017 - 2022
2	y	-	(Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah pengadaan yang dilakukan tidak dengan metode kompetitif) x 100%									2.25%	
3		-	(Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan / Total belanja langsung) x 100%									45.48%	

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi digunakan alat ukur yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dan sasaran strategis Sekretariat Daerah. Adapun Analisa Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah pada tahun 2021 adalah seperti yang tertuang pada table II.2.2 sebagai berikut:

**Tabel II.2.2**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi PD Setda yang berkualitas	Pencapaian RB PD Setda	Meningkatkan Tata Kelola Internal PD Setda	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76 %	92.785.492	77.50 %	63.490.928	Biro Umum
				Survey Kepuasan Pelayanan Internal SETDA	80%	82.067.554.620	88,37 %	77.283.954.741	Biro Umum
2	Mewujudkan Kebijakan Daerah yang berkualitas	Persentase Kebijakan Daerah yang terimplementasi	Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi Daerah yang tersusun	80%	473.288.000	80%	377.137.423	Biro Organisasi
				Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun	90%	4.166.868.010	90%	3.591.698.046	Biro Pemerintahan
				Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	70%	30.420.749.356	72,08 %	27.646.725.548	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang hukum yang tersusun	90%	923.093.664	100 %	921.788.408	Biro Hukum
				Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta	65%	151.335.827	100 %	123.080.860	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

			Pengadaan Barang/Jasa						
				Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun	50 %	1.407.767.968	100 %	1.172.170.082	Biro Pengadaan Barang Jasa
				Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun	65 %	169.095.043	100 %	85.327.107	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu penting yang ada di Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
2. Efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
3. Penataan Ketataklasan;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan;
7. Optimalisasi Pelayanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
8. Penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum;
9. Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
10. Belum optimalnya penataan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
11. Belum optimalnya optimalisasi evaluasi produk hukum daerah;
12. Belum optimalnya penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
13. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
14. Belum Optimalnya penataan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat;
15. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
16. Organisasi Perangkat daerah yang menyerahkan LAKIP Tahun 2018-2023 tepat waktu sebesar 90%;
17. Organisasi yang menyusun Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2018-2023 tepat waktu sebesar 90%; Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 55 | B A B I I I
18. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik (UPP) atas penilaian Ombudsmen;
19. Kurang memandaikan sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur;

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu



mengatasi dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel. Sehingga diperlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas peningkatan kapasitas SDM seluruh Biro lingkup Sekretariat Daerah, pemantapan kelembagaan Biro di tunjang oleh sarana dan prasarana kerja yang berkontribusi secara optimal dalam membangun etos kerja yang prima, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dan meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Nilai Sakip PD Setda	76	300.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Nilai Sakip PD Setda	76	300.000.000	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD Setda yang disusun tepat waktu	95%	300.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD Setda yang disusun tepat waktu	95%	300.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	175.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	175.000.000	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.000.000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	75.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	75.000.000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun	75%	975.000.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun	75%	975.000.000	

	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi Perekonomian yang dikeluarkan	65%	450.000.000	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi Perekonomian yang dikeluarkan	65%	450.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	12 Dokumen	250.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	12 Dokumen	250.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	12 Dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	12 Dokumen	200.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang dikeluarkan	65%	275.000.000	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang dikeluarkan	65%	275.000.000	

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12 Dokumen	75.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12 Dokumen	75.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	12 Dokumen	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	12 Dokumen	100.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12 Dokumen	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12 Dokumen	100.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi BUMD dan BLUD yang dikeluarkan	65%	250.000.000	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi BUMD dan	65%	250.000.000	

								BLUD yang dikeluarkan			
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	5 Dokumen	85.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	5 Dokumen	85.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	40.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	40.000.000	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	5 Dokumen	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	5 Dokumen	50.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	75.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	75.000.000	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun	75%	409.000.000	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi	75%	409.000.000	



								Pembangunan yang tersusun			
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan	65%	225.000.000	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan	65%	225.000.000	
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Dokumen	50.000.000	
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Dokumen	50.000.000	
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	4 Dokumen	125.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	4 Dokumen	125.000.000	

	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rekomendasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan	65%	184.000.000	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rekomendasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan	65%	184.000.000	
	Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	12 Dokumen	60.000.000	Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	12 Dokumen	60.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	6 Dokumen	74.000.000	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	6 Dokumen	74.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	6 Dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	6 Dokumen	50.000.000	
2	Program Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun	80%	1.089.810.000	Program Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun	80%	1.089.810.000	

	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan	60%	1.089.810.000	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan	60%	1.089.810.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	8 Laporan	141.560.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	8 Laporan	141.560.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	8 Laporan	826.500.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	8 Laporan	826.500.000
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	8 Laporan	121.750.000	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	8 Laporan	121.750.000
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dikeluarkan	60%	1.617.218.545	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dikeluarkan	60%	1.617.218.545

	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	8 Laporan	1.427.218.545	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	8 Laporan	1.427.218.545
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi (Laporan)	8 Laporan	105.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi (Laporan)	8 Laporan	105.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	8 Laporan	85.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	8 Laporan	85.000.000
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan	60%	242.936.170	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan	60%	242.936.170
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Penataan kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	8 Dokumen	79.936.170	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Penataan kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	8 Dokumen	79.936.170

	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	8 orang	88.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	8 orang	88.000.000	
	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan /atau Bintelk Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan/ atau Bintelk Pengadaan Barang dan Jasa	8 Dokumen	75.000.000	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan /atau Bintelk Pengadaan Barang dan Jasa	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan/ atau Bintelk Pengadaan Barang dan Jasa	8 Dokumen	75.000.000	
3	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	99.978.300.000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	99.978.300.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	42.607.794.954	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	42.607.794.954	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	48	42.478.194.954	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	48	42.478.194.954	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	100.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (dokumen)	3		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (dokumen)	3		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	18	29.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	18	29.600.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	178.200.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	178.200.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi AdministrasiJumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	2	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi AdministrasiJumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	2	-	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	12		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	12		

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	12	178.200.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	12	178.200.000	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	-	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	-	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	-	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (dokumen)	1		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (dokumen)	1		



Pengolahan Data Retribusi Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (laporan)	1		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (laporan)	1		
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	1		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	1		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	1.016.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	1.016.000.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)	5	6.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)	5	6.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	1	500.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	1	500.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	1		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1		

							Kepegawaian (dokumen)			
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	1		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	1		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	1		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	1		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20	150.000.000	

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	20	150.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	20	150.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	10	210.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	10	210.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	16.738.957.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	16.738.957.250	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	12	650.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	12	650.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	12	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	12	200.000.000	

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	190.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	190.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	12	90.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	12	90.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	450.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	450.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12	180.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12	180.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)	12	850.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)	12	850.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12	8.128.957.250	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12	8.128.957.250	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	6.000.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	6.000.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	1		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	1		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	6.937.750.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	6.937.750.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	3	900.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	900.000.000	

							yang Disediakan (unit)			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkalp inang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	4	3.280.000.0 00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkalp inang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	4	3.280.000.000	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pangkalp inang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (unit)	3		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pangkalp inang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (unit)	3		
Pengadaan Mebel	Pangkalp inang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	3	322.000.000	Pengadaan Mebel	Pangkalp inang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	3	322.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pangkalp inang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	50	1.345.750.0 00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pangkalp inang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	50	1.345.750.000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pangkalp inang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (unit)	5	40.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pangkalp inang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (unit)	5	40.000.000	

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	3	737.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	3	737.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	3	313.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	3	313.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	14.340.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	14.340.500.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	40.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	40.500.000	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	4.500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	4.500.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	12	2.000.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	12	2.000.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	7.800.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	7.800.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	9.565.250.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	9.565.250.000	



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	16	897.705.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	16	897.705.500	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	78	2.633.869.150	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	78	2.633.869.150	
Pemeliharaan Mebel	Pangkalpinang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	100	180.000.000	Pemeliharaan Mebel	Pangkalpinang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	100	180.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	50	895.925.745	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	50	895.925.745	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	6	3.613.719.605	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (unit)	6	3.613.719.605	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	6	1.094.030.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (unit)	6	1.094.030.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	4	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (unit)	4	250.000.000	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	1.554.610.296	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	1.554.610.296	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang/bulan)	12	139.610.296	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang/bulan)	12	139.610.296	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (paket)	2	85.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (paket)	2	85.000.000	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang)	6	80.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang)	6	80.000.000	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang/bulan)	12	1.250.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang/bulan)	12	1.250.000.000	

Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	1.905.237.500	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	1.905.237.500	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (paket)	12	879.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (paket)	12	879.000.000	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (paket)	12	212.137.500	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (paket)	12	212.137.500	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (paket)	12	814.100.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (paket)	12	814.100.000	
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	1.890.000.000	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	1.890.000.000	
Penyiapan Materi Pimpinan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (dokumen)	12	130.000.000	Penyiapan Materi Pimpinan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (dokumen)	12	130.000.000	

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (laporan)	12	1.160.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (laporan)	12	1.160.000.000	
Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (laporan)	12	600.000.000	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (laporan)	12	600.000.000	
Fasilitasi Keprotokolan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	3.244.000.000	Fasilitasi Keprotokolan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam		80%	3.244.000.000	
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (laporan)	12	1.000.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (laporan)	12	1.000.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (laporan)	12	800.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (laporan)	12	800.000.000	
Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (laporan)	12	1.444.000.000	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan	12	1.444.000.000	

							Keprotokolan (laporan)				
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Provinsi Kepulaua n Bangka Belitung	PERSENTASE USULAN KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERSUSUN	70%	57.823.095. 539	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Provinsi Kepulaua n Bangka Belitung	PERSENTASE USULAN KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG KESEJAHTERA AN RAKYAT YANG TERSUSUN	70%	57.823.095.539	
	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Provinsi Kepulaua n Bangka Belitung	Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual yang dikeluarkan	75%	11.525.750. 742	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Provinsi Kepulaua n Bangka Belitung	Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual yang dikeluarkan	75%	11.525.750.742	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Provinsi Kepulaua n Bangka Belitung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Spiritual yang dikelola	100 Unit	9.883.742.7 89	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Provinsi Kepulaua n Bangka Belitung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Spiritual yang dikelola	100 Unit	9.883.742.789	
	Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Provinsi Kepulaua n Bangka Belitung	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	60 Lembaga	1.642.007.9 53	Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Provinsi Kepulaua n Bangka Belitung	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	60 Lembaga	1.642.007.953	

	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dikeluarkan	75%	129.448.328	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dikeluarkan	75%	129.448.328	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	7 Dokumen	76.687.213	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	7 Dokumen	76.687.213	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7 Dokumen	52.761.115	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7 Dokumen	52.761.115	
	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dikeluarkan	75%	46.167.896.469	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	75%	46.167.896.469	



								Pelayanan Dasar yang dikeluarkan			
	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	60 Dokumen	521.359.887	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	60 Dokumen	521.359.887	
	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	50 Dokumen	90.313.005	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	50 Dokumen	90.313.005	
	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan	160 Dokumen	45.556.223.577	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian	160 Dokumen	45.556.223.577	

			Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	<b>PENATAAN ORGANISASI</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi	80%	1.940.772.521	<b>PENATAAN ORGANISASI</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi	80%	1.940.772.521	
	<b>Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang dikeluarkan	80%	621.241.770	<b>Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang dikeluarkan	80%	621.241.770	
	<b>Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah dokumen hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	12	140.027.724	<b>Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah dokumen hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	12	140.027.724	
	<b>Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah dokumen hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/kota	12	206.620.002	<b>Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah dokumen hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/kota	12	206.620.002	

	<b>Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah dokumen hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	12	274.594.044	<b>Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah dokumen hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	12	274.594.044	
2	<b>Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Akuntabilitas Kinerja, Budaya Kerja dan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan	80%	1.319.530.751	<b>Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase Rumusan Kebijakan Akuntabilitas Kinerja, Budaya Kerja dan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan	80%	1.319.530.751	
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan RB	12	527.391.000	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan RB	12	527.391.000	
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	12	271.244.800	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	12	271.244.800	
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	27	188.918.000	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	27	188.918.000	

	<b>Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	33	70.257.926	<b>Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	33	70.257.926	
	<b>Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah dokumen hasil fasilitas peningkatan Pelayanan Publik	12	261.719.025	<b>Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah dokumen hasil fasilitas peningkatan Pelayanan Publik	12	261.719.025	

6	<b>FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	persentase jumlah rancangan produk hukum yang terselesaikan, bantuan hukum serta informasi hukum yang mudah diakses	85%	1.208.154.112	<b>FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	persentase jumlah rancangan produk hukum yang terselesaikan, bantuan hukum serta informasi hukum yang mudah diakses	85%	1.208.154.112	
	<b>Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase jumlah rancangan produk hukum yang terselesaikan	85%	1.047.914.450	<b>Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Persentase jumlah rancangan produk hukum yang terselesaikan	85%	1.047.914.450	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah produk hukum pengaturan OPD mitra 1 yang disusun	50	813.981.579	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Aritam	Jumlah produk hukum pengaturan OPD mitra 1 yang disusun	50	813.981.579	

	Sub Kegiatan Fasilitas Produk Hukum Penetapan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Air itam	Jumlah produk hukum penetapan yang disusun	950	48.484.038	Sub Kegiatan Fasilitas Produk Hukum Penetapan	Pangkalpinang, Bukit Intan, Air itam	Jumlah produk hukum penetapan yang disusun	950	48.484.038	
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah produk hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi hukumnya	115	135.574.102	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya	Pangkalpinang, Bukit Intan, Airitam	Jumlah produk hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi hukumnya	115	135.574.102	
	Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Pangkalpinang, Bukit Intan, Air itam	Jumlah produk hukum Kabupaten /Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	28	49.874.731	Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Pangkalpinang, Bukit Intan, Air itam	Jumlah produk hukum Kabupaten /Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	28	49.874.731	
	<b>Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Air itam	Persentase jumlah pemberian pelayanan bantuan hukum	85%	160.239.662	<b>Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum</b>	Pangkalpinang, Bukit Intan, Air itam	Persentase jumlah pemberian pelayanan bantuan hukum	85%	160.239.662	
	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum	Pangkalpinang, Bukit Intan, Air itam	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	4	115.431.943	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum	Pangkalpinang, Bukit Intan, Air itam	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	4	115.431.943	
	Sub Kegiatan Penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM	Pangkalpinang, Bukit Intan, Air itam	Jumlah Masalah Non Litigasi yang diselesaikan	50	44.807.719	Sub Kegiatan Penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM	Pangkalpinang, Bukit Intan, Air itam	Jumlah Masalah Non Litigasi yang diselesaikan	50	44.807.719	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Sekretrariat Daerah tahun 2023 merupakan rangkuman Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses terlampir pada Tabel ..... sebagai berikut :

Tabel .....  
Rumusan Usulan Program/Kegiatan  
Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi  
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Kota Pangkalpinang	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	2 Unit	Belum optimalnya Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	2 Unit	
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	9 Unit	
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Kabupaten Belitung	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	8 Unit	
5	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Kabupaten Belitung Timur	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	2 Unit	
6	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	12 Unit	
7	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Kabupaten Bangka	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	12 Unit	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Selaras dengan agenda pembangunan nasional arah kebijakan dan strategi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari arah kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Tema pembangunan nasional tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak covid 19 dengan berorientasi pada membangun kedepan dengan lebih baik (*Build Forward Better*), adapun tema pembangunan nasional tahun 2022 adalah: "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Harus kita ingat bahwa fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian *covid 19*, dengan mendorong industri agar bangkit dan para pekerja bisa mulai bekerja kembali, sehingga mampu membuat sisi permintaan domestik meningkat, nilai tambah sektor industri harus ditingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat dan pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi harus menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah. Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antar daerah maupun antar desa dengan kota. Namun semuanya harus tetap dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat.

Reformasi struktural secara besar-besaran sudah dimulai dengan penetapan undang-undang Cipta Kerja. Semua Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural. Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang mana sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program nasional. Selain pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan meningkatkan peran pada kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik.

### **3.2. Tujuan Dan Sasaran Perangkat daerah**

Tujuan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk membangun sebuah rencana pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam menyusun program dan indikator kinerja 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang dilimpahkan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana di dalam renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebutkan bahwa Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi harus dapat memberikan layanan yang baik kepada pimpinan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima. Atau yang dikenal dengan Semboyan ASN "Primadona" Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut yaitu Meningkatkan tatakelola penyelenggaraan pemda, sistem akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan pelayanan pemda terhadap masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah dan Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan yang lebih optimal. Di dalam renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebutkan bahwa Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi harus dapat memberikan layanan yang baik kepada pimpinan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut yaitu Meningkatkan tatakelola penyelenggaraan pemda, sistem akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan pelayanan pemda terhadap masyarakat.

Seperti kita ketahui Bersama bahwa pada tahun 2022 tepatnya di bulan Mei 2022 masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung akan berakhir dan akan dijabat oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang nantinya diharapkan dengan dijabat oleh Penjabat Gubernur, tetap tidak mengendorkan semangat untuk mencapai mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang akan di capai.

- a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD
- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Kegiatan Fasilitasi Peringatan hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional

#### **2. Program Pengelolaan Administrasi Keuangan, Perlengkapan dan RumahTangga**

- a. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Keuangan dan Perlengkapan
- b. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan

#### **3. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan danKemasyarakatan**

- a. Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan Sosial



- b. Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Agama dan Kebudayaan
  - c. Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Pendidikan dan Kepemudaan
- 4. Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan kehumasan**
- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Kehumasan, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
  - b. Kegiatan Penyebarluasan informasi kegiatan KDH/WKDH, Sekretaris Daerah
  - c. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Keprotokolan, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
- 5. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**
- a. Kegiatan Penatausahaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - b. Kegiatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
  - c. Kegiatan Fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui bagian PBJ
- 6. Program Administrasi, Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah**
- a. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rumusan Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
  - b. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rumusan Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Produk Daerah
  - c. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rumusan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan BUMD
- 7. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai**
- a. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai.
- 8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum,**
- Dokumentasi dan Pengkajian Hukum**
- a. Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
  - b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
  - c. Kegiatan Dokumentasi dan Pengkajian Hukum

**9. Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan**

- a. Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah
- b. Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Daerah

**10. Program Kelembagaan dan Analisis jabatan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, serta Pengembangan Kinerja**

- a. Kegiatan Penataan kelembagaan perangkat daerah dan Analisis Jabatan
- b. Kegiatan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja

**11. Program Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

- a. Kegiatan Fasilitasi Administrasi pemerintahan Umum
- b. Kegiatan Fasilitasi Kinerja Aparatur Kecamatan dan Lintas PD
- c. Kegiatan Fasilitasi Otonomi Daerah

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022  
dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				Rp 164.206.072.618,00				
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>80%</b>	<b>99.978.300.000</b>	<b>APBD</b>		<b>80%</b>	<b>Rp 104.977.215.000,00</b>
4..01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			80%	42.607.794.954	APBD		80%	Rp 44.738.184.701,70
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Pangkalpinang	48	42.478.194.954	APBD		48	Rp 44.602.104.701,70

4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	Pangkalpinang	12	-	APBD		12	Rp -
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	Pangkalpinang	1	100.000.000	APBD		1	Rp 105.000.000,00
4.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (dokumen)	Pangkalpinang	3		APBD		3	Rp -
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Pangkalpinang	18	29.600.000	APBD		18	Rp 31.080.000,00

		Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (laporan)							
4.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80%	178.200.000	APBD		80%	Rp 187.110.000,00
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	Pangkalpinang	2	-	APBD		2	Rp -
4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	Pangkalpinang	12		APBD		12	Rp -
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	Pangkalpinang	1		APBD		1	Rp -
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	Pangkalpinang	12	178.200.000	APBD		12	Rp 187.110.000,00

4.01.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	Pangkalpinang	1	-	APBD		1	Rp -
4.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			80%	-	APBD		80%	Rp -
4.01.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (dokumen)	Pangkalpinang	1		APBD		1	Rp -
4.01.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (laporan)	Pangkalpinang	1		APBD		1	Rp -
4.01.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	Pangkalpinang	1		APBD		1	Rp -
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			80%	1.016.000.000	APBD		80%	Rp 1.066.800.000,00
4.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)	Pangkalpinang	5	6.000.000	APBD		5	Rp 6.300.000,00

4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	Pangkalpinang	1	500.000.000	APBD		1	Rp 525.000.000,00
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	Pangkalpinang	1		APBD		1	Rp -
4.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	Pangkalpinang	1		APBD		1	Rp -
4.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	Pangkalpinang	1		APBD		1	Rp -
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Pangkalpinang	20	150.000.000	APBD		20	Rp 157.500.000,00
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti	Pangkalpinang	20	150.000.000	APBD		20	Rp 157.500.000,00



		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)							
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Pangkalpinang	10	210.000.000	APBD		10	Rp 220.500.000,00
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			80%	16.738.957.250	APBD		80%	Rp 17.575.905.112,50
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	12	650.000.000	APBD		12	Rp 682.500.000,00
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	12	200.000.000	APBD		12	Rp 210.000.000,00
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	1	190.000.000	APBD		1	Rp 199.500.000,00
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Pangkalpinang	12	90.000.000	APBD		12	Rp 94.500.000,00

		Kantor yang Disediakan (paket)							
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	12	450.000.000	APBD		12	Rp 472.500.000,00
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Pangkalpinang	12	180.000.000	APBD		12	Rp 189.000.000,00
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	12	850.000.000	APBD		12	Rp 892.500.000,00
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Pangkalpinang	12	8.128.957.250	APBD		12	Rp 8.535.405.112,50
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Pangkalpinang	12	6.000.000.000	APBD		12	Rp 6.300.000.000,00
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	Pangkalpinang	1		APBD		1	Rp -

4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	Pangkalpinang	1		APBD		1	Rp -
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80%	6.937.750.000	APBD		80%	Rp 7.284.637.500,00
4.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	Pangkalpinang	3	900.000.000	APBD		3	Rp 945.000.000,00
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	Pangkalpinang	4	3.280.000.000	APBD		4	Rp 3.444.000.000,00
4.01.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (unit)	Pangkalpinang	3		APBD		3	Rp -
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	3	322.000.000	APBD		3	Rp 338.100.000,00

4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	Pangkalpinang	50	1.345.750.000	APBD		50	Rp 1.413.037.500,00
4.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (unit)	Pangkalpinang	5	40.000.000	APBD		5	Rp 42.000.000,00
4.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Pangkalpinang	1		APBD		1	Rp -
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Pangkalpinang	3	737.000.000	APBD		3	Rp 773.850.000,00
4.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Pangkalpinang	3	313.000.000	APBD		3	Rp 328.650.000,00
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80%	14.340.500.000	APBD		80%	Rp 15.057.525.000,00

4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Pangkalpinang	12	40.500.000	APBD		12	Rp 42.525.000,00
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Pangkalpinang	12	4.500.000.000	APBD		12	Rp 4.725.000.000,00
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Pangkalpinang	12	2.000.000.000	APBD		12	Rp 2.100.000.000,00
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Pangkalpinang	12	7.800.000.000	APBD		12	Rp 8.190.000.000,00
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80%	9.565.250.000	APBD		80%	Rp 10.043.512.500,00
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	Pangkalpinang	16	897.705.500	APBD		16	Rp 942.590.775,00

4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Pangkalpinang	78	2.633.869.150	APBD		78	Rp 2.765.562.607,50
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	Pangkalpinang	100	180.000.000	APBD		100	Rp 189.000.000,00
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Pangkalpinang	50	895.925.745	APBD		50	Rp 940.722.032,25
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Pangkalpinang	6	3.613.719.605	APBD		6	Rp 3.794.405.585,25
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Pangkalpinang	6	1.094.030.000	APBD		6	Rp 1.148.731.500,00
4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Pangkalpinang	4	250.000.000	APBD		4	Rp 262.500.000,00

		Dipelihara/Direhabilitasi (unit)							
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			80%	1.554.610.296	APBD		80%	Rp 1.632.340.810,80
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang/bulan)	Pangkalpinang	12	139.610.296	APBD		12	Rp 146.590.810,80
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	2	85.000.000	APBD		2	Rp 89.250.000,00
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang)	Pangkalpinang	6	80.000.000	APBD		6	Rp 84.000.000,00
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Pangkalpinang	12	1.250.000.000	APBD		12	Rp 1.312.500.000,00

		Kepala Daerah (orang/bulan)							
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			80%	1.905.237.500	APBD		80%	Rp 2.000.499.375,00
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	12	879.000.000	APBD		12	Rp 922.950.000,00
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	12	212.137.500	APBD		12	Rp 222.744.375,00
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (paket)	Pangkalpinang	12	814.100.000	APBD		12	Rp 854.805.000,00
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			80%	1.890.000.000	APBD		80%	Rp 1.984.500.000,00
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (dokumen)	Pangkalpinang	12	130.000.000	APBD		12	Rp 136.500.000,00
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi	Pangkalpinang	12	1.160.000.000	APBD		12	Rp 1.218.000.000,00



		Pimpinan (laporan)							
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (laporan)	Pangkalpinang	12	600.000.000	APBD		12	Rp 630.000.000,00
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan			80%	3.244.000.000	APBD		80%	Rp 3.406.200.000,00
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (laporan)	Pangkalpinang	12	1.000.000.000	APBD		12	Rp 1.050.000.000,00
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (laporan)	Pangkalpinang	12	800.000.000	APBD		12	Rp 840.000.000,00
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (laporan)	Pangkalpinang	12	1.444.000.000	APBD		12	Rp 1.516.200.000,00
4.01.02	PENATAAN ORGANISASI	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi	Pangkalpinang	80%	Rp 452.428.026,00	APBD		80%	1.940.772.521

4.01.02.1.01	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Usulan Rekomendasi Analisis Jabatan	Pangkalpinang	80%	Rp 150.666.675,00	APBD		80%	621.241.770
4.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah pendampingan dan pembinaan evaluasi organisasi yang dilaksanakan	Pangkalpinang	8	47.216.091	APBD		12	140.027.724
		Jumlah UPT/Cabdin/Satuan Pendidikan yang terevaluasi	Pangkalpinang	7		APBD			
		Jumlah Raperda Kabupaten/Kota yang terevaluasi	Pangkalpinang	4		APBD			
		Jumlah Laporan/rekomendasi hasil evaluasi organisasi	Pangkalpinang	4		APBD			
4.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan pengendalian PD Kab/Kota	Pangkalpinang	7	47.972.454	APBD			

		Jumlah Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Pangkalpinang	7		APBD		12	206.620.002
		Jumlah Rekomendasi pembentukan PD Kab/Kota	Pangkalpinang	7		APBD			
4.01.02.1.01.03	<b>Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan</b>	Jumlah Pembinaan dan pendampingan penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan peta jabatan sesuai dengan ketentuan	Pangkalpinang	4	55.478.130	APBD		12	274.594.044
		Jumlah Pembinaan dan pendampingan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sesuai dengan ketentuan	Pangkalpinang	4		APBD			

		Jumlah Pembinaan dan pendampingan penyusunan Evaluasi Jabatan sesuai dengan ketentuan	Pangkalpinang	4		APBD			
		Jumlah PD yang menyusun Kebutuhan pegawai sesuai dengan ketentuan	Pangkalpinang	4		APBD			
		Jumlah jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan	Pangkalpinang	1		APBD			
4.01.02.1.02	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Rumusan Kebijakan Akuntabilitas Kinerja, Budaya Kerja dan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan	Pangkalpinang	80%	Rp 301.761.351,00	APBD		80%	1.319.530.751

4.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pertemuan Tim RBI yang dilaksanakan	Pangkalpinang	2	49.175.000	APBD			
		Jumlah PD yang melaksanakan rencana aksi RB	Pangkalpinang	27		APBD			
		Jumlah monitoring rencana Aksi RB yang dilaksanakan	Pangkalpinang	2		APBD			
		Jumlah Pembinaan Pelaksanaan RB yang dilaksanakan	Pangkalpinang	18		APBD		12	527.391.000
		Jumlah PD yang Melaporkan pelaksanaan RB	Pangkalpinang	27		APBD			
		Jumlah rencana aksi RB Unit Setda yang dilaksanakan	Pangkalpinang	8		APBD			
4.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja	Pangkalpinang	1	52.542.400	APBD			

		Instansi Pemerintah						
		Jumlah dokumen SAKIP yang di aplod tepat waktu	Pangkalpinang	27		APBD		
		Jumlah pembinaan akuntabilitas yang dilaksanakan	Pangkalpinang	8		APBD	12	271.244.800
		Jumlah PD yang mendapatkan <i>reward and punishment</i>	Pangkalpinang	6		APBD		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja Triwulan	Pangkalpinang	4		APBD		
4.01.02.1.02.03	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah agen perubahan yang melaksanakan rencana aksi agen perubahan	Pangkalpinang	27	46.914.000	APBD	27	188.918.000
		Jumlah Pembinaan Agen Perubahan	Pangkalpinang	34		APBD		

		yang dilaksanakan							
		Jumlah monitoring rencana Aksi Agen Perubahan yang dilaksanakan	Pangkalpinang	4		APBD			
		Jumlah Agen Perubahan yang Melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi	Pangkalpinang	27		APBD			
4.01.02.1.02.04	<b>Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan</b>	Jumlah PD yang telah menyederhanakan proses bisnis dan SOP	Pangkalpinang	35	29.531.926	APBD			70.257.926
		Jumlah pembinaan Tatalaksana Pemerintahan yang dilaksanakan	Pangkalpinang	43		APBD		33	
		Jumlah Monitoring Tatalaksana Pemerintahan yang dilaksanakan	Pangkalpinang	43		APBD			

4.01.02.1.02.05	Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Unit layanan yang melaksanakan pelayanan publik dengan baik dan berkualitas	Pangkalpinang	7	123.598.025	APBD		12	261.719.025
		Jumlah pembinaan dan pendampingan pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan	Pangkalpinang	76		APBD			
		Jumlah Monitoring Tatalaksana Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Pangkalpinang	12		APBD			
4.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah				Rp 543.679.182,00				Rp 2.548.997.182,00
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			90%	Rp -	APBD		75%	Rp 1.258.497.148,00
4.01.03.1.01.01	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (dokumen)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	N/A		APBD		38	220.000.000
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan	Provinsi Kepulauan	N/A		APBD		2	300.000.000



		Pemerintahan Umum (dokumen)	Bangka Belitung						
4.01.03.1.01.03	Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah (dokumen)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	N/A		APBD		2	738.497.148
4.01.03.1.02	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>			90%	Rp 473.963.534,00	APBD		75%	Rp 2.533.630.143,00
4.01.03.1.02.01	Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	N/A		APBD		4	781.627.257
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	N/A		APBD		3	1.200.000.000
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	N/A		APBD		4	552.002.886
4.01.03.1.03	<b>Fasilitas Kerja Sama Daerah</b>			90%	Rp 69.715.648,00	APBD		75%	Rp 490.000.000,00
4.01.03.1.03.01	Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	N/A		APBD		2	40.000.000
4.01.03.1.03.02	Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	N/A		APBD		15	100.000.000

4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	N/A		APBD		6	350.000.000
<b>4.01.04</b>	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>				<b>Rp 60.975.248.400,00</b>				<b>Rp 57.823.095.539,00</b>
4.01.04.1.01	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Rekomendasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang dikeluarkan		75%	Rp 8.716.117.671,00	APBD		75%	Rp 11.525.750.742,00
4.01.04.1.01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual yang dibuat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 Berkas	Rp 7.817.079.672,00	APBD		100 Unit	Rp 9.883.742.789,00
4.01.04.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual yang dibuat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10 Berkas	Rp 899.037.999,00	APBD		60 Lembaga	Rp 1.642.007.953,00
4.01.04.1.02	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan		75%	Rp 52.141.450.431,00	APBD		75%	Rp 46.167.896.469,00

		Rakyat Pelayanan Dasar yang dikeluarkan							
4.01.04.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan yang dibuat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8 Berkas	Rp 473.963.534,00	APBD		60 Dokumen	Rp 521.359.887,00
4.01.04.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan yang dibuat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8 Berkas	Rp 82.102.732,00	APBD		50 Dokumen	Rp 90.313.005,00
4.01.04.1.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial yang dibuat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8 Berkas	Rp 51.585.384.165,00	APBD		160 Dokumen	Rp 45.556.223.577,00
4.01.04.1.03	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dikeluarkan		75%	Rp 117.680.298,00	APBD		75%	Rp 129.448.328,00

4.01.04.1.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata yang dibuat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 Berkas	Rp 69.715.648,00	APBD		7 Dokumen	Rp 76.687.213,00
4.01.04.1.03.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dibuat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 Berkas	Rp 47.964.650,00	APBD		7 Dokumen	Rp 52.761.115,00

<b>4.01.05</b>	<b>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Presentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Hukum yang tersusun</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 1.154.260.696,00</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>1.208.154.112</b>
4.01.05.1.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Rekomendasi PHD yang dikeluarkan	Pangkalpinang	80%	Rp 1.008.588.276,00	APBD		90%	1.047.914.450
		Persentase Rekomendasi Pendokumentasian PHD yang dikeluarkan	Pangkalpinang			APBD			
		Persentase Rekomendasi Pendokumentasian PHD Kabupaten/Kota yang dikeluarkan	Pangkalpinang			APBD			
4.01.05.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah produk hukum pengaturan yang disusun	Pangkalpinang	35 Pergub dan 10 Raperda	Rp 786.980.323,00	APBD		50	Rp 813.981.579,00
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang disusun	Pangkalpinang	500 Kpts	Rp 48.484.038,00	APBD		950	Rp 48.484.038,00

4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah produk hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi hukumnya	Pangkalpinang	100 Naskah	Rp 123.249.184,00	APBD		115	Rp 135.574.102,00
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota wilayah 1 yang difasilitasi dan dievaluasi	Pangkalpinang	7 Rancangan	Rp 49.874.731,00	APBD		28	Rp 49.874.731,00
4.01.05.1.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Presentase Rekomendasi Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat miskin yang dikeluarkan	Pangkalpinang	80%	Rp 145.672.420,00	APBD		85	Rp 160.239.662,00
		Presentase rekomendasi penyelesaian sengketa hukum pemda yang dikeluarkan	Pangkalpinang			APBD			
4.01.05.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	Pangkalpinang	2 kasus	Rp 104.938.130,00	APBD		4	Rp 115.431.943,00

4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	umlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	Pangkalpinang	1 Laporan	Rp 40.734.290,00	APBD		50	Rp 44.807.719,00
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun	Pangkalpinang	75%	Rp 177.208.227	APBD		75%	Rp 975.000.000
4.01.06.1.01	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi Perekonomian yang dikeluarkan	Pangkalpinang	65%	Rp 25.376.224	APBD		65%	Rp 450.000.000
4.01.06.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Pangkalpinang	12	Rp 18.320.502	APBD		12	Rp 250.000.000
4.01.06.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan	Pangkalpinang	12	Rp 7.055.722	APBD		12	Rp 200.000.000

		Ekonomi Mikro							
4.01.06.1.02	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang dikeluarkan	Pangkalpinang	65	Rp 84.601.209	APBD		65%	Rp 275.000.000
4.01.06.1.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Pangkalpinang	12	Rp 11.655.186	APBD		12	Rp 75.000.000
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Pangkalpinang	12	Rp 28.855.418	APBD		12	Rp 100.000.000



4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Pangkalpinang	12	Rp 44.090.605	APBD		12	Rp 100.000.000
4.01.06.1.03	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi BUMD dan BLUD yang dikeluarkan	Pangkalpinang	65	Rp 67.230.794	APBD		65%	Rp 250.000.000
4.01.06.1.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Pangkalpinang	5	Rp 50.580.919	APBD		5	Rp 85.000.000

4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Pangkalpinang					1	Rp 40.000.000
4.01.06.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Pangkalpinang					1	
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan	Pangkalpinang	5	Rp 16.649.875			5	Rp 50.000.000

		Layanan Umum Daerah							
4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Pangkalpinang			APBD		1	Rp 75.000.000
<b>4.01.07</b>	<b>Program Kebijakan dan Pelayanan Barang dan Jasa</b>				<b>Rp 1.102.156.314,00</b>				<b>Rp 2.949.964.715,00</b>
4.01.07.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkann		100%	Rp 468.795.005,00	APBD		60%	Rp 1.089.810.000,00
4.01.07.1.01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 Laporan	-	APBD		8 Laporan	141.560.000
4.01.07.1.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan	Provinsi Kepulauan	12 Laporan	468.795.005	APBD		8 Laporan	826.500.000

	Pengadaan Barang dan Jasa	Barang dan Jasa (Laporan)	Bangka Belitung						
4.01.07.1.01.03	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 Laporan	-	APBD		8 Laporan	121.750.000
4.01.07.1.02	<b>Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dikeluarkan		100%	Rp 535.025.889,00	APBD		60%	Rp 1.617.218.545,00
4.01.07.1.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 Laporan	Rp 479.687.446,00	APBD		8 Laporan	1.427.218.545
4.01.07.1.02.02	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi (Laporan)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 Laporan	Rp 40.172.151,00	APBD		8 Laporan	105.000.000

4.01.07.1.02.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 Laporan	Rp 15.166.292,00	APBD		8 Laporan	85.000.000
4.01.07.1.03	<b>Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Persentase Rumusan Kebijakan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan		100%	Rp 98.335.420,00	APBD		60%	Rp 242.936.170,00
4.01.07.1.03.01	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 Laporan	Rp 51.274.947,00	APBD		8 Dokumen	79.936.170
4.01.04.7.03.02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 Laporan	Rp 47.060.473,00	APBD		8 orang	88.000.000

4.01.04.7.03.03	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan /atau Bintel Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan , Konsultasi dan/ atau Bintel Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 Laporan	Rp 44.721.784,00	APBD		8 Dokumen	75.000.000
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun	Pangkalpinang		Rp 123.198.725	APBD		75%	Rp 409.000.000
4.01.08.1.01	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan	Pangkalpinang			APBD		65%	Rp 225.000.000
4.01.08.1.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan	Pangkalpinang		Rp 79.208.062	APBD		4	Rp 50.000.000

		Pembangunan APBD							
4.01.08.1.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Pangkalpinang			APBD		4	Rp 50.000.000
4.01.08.1.01.03	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Pangkalpinang			APBD		4	Rp 125.000.000
4.01.08.1.02	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan	Pangkalpinang		Rp 79.208.062	APBD		65%	Rp 184.000.000
4.01.08.1.02.01	Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Pangkalpinang			APBD		12	Rp 60.000.000

4.01.08.1.02.02	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pangkalpinang		Rp 43.990.663	APBD		6	Rp 74.000.000
4.01.08.1.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Pangkalpinang		Rp 43.990.663	APBD		6	Rp 50.000.000



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dimana berpedoman pada renstra Sekretariat Daerah untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju serta berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi renja Sekretariat Daerah tahun berjalan agar dapat memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan renja Sekretariat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan tujuan seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah secara efektif dan efisien, disamping itu Renja ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2023.

Penetapan program dan kegiatan dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja ini didasarkan atas prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Provinsi yang telah tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah, dalam pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini diutamakan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan. Apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja ini, program/kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Renja tahun 2023 ini setelah disempurnakan, kemudian akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

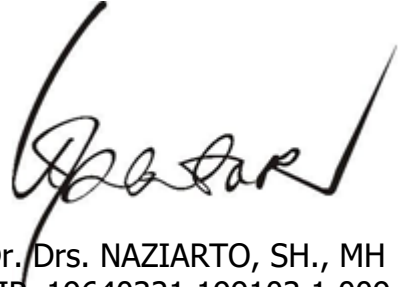
Untuk mengantisipasi target yang tidak tercapai atau bahkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan maka

diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi tersebut terdiri dari pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana kerja. Evaluasi terhadap hasil rencana kerja dilaksanakan secara periodik setiap triwulanan terkait program/kegiatan/subkegiatan, kinerja dan anggaran, permasalahan dan faktor pendorong dan penghambat serta rencana tindak lanjut yang diperlukan.

Demikianlah Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.

Pangkalpinang,     Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. Drs. NAZIARTO, SH., MH  
NIP. 19640321 199103 1 009

